

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia merupakan subjek yang menarik untuk ditelaah, khususnya dalam aspek kurikulum pendidikan yang diterapkan. Sistem ini telah mengalami beberapa kali perubahan dari waktu ke waktu, dengan total sebanyak 11 (sebelas) kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Ini termasuk kurikulum terbaru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim, melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 2013 dengan memperkenalkan Kurikulum Merdeka Belajar.

Transformasi kurikulum diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang berasal dari analisis mendalam, evaluasi menyeluruh, prediksi kebutuhan, serta pemahaman akan berbagai tantangan yang timbul, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal dan senantiasa berubah. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai hasil kebijakan menunjukkan sifatnya yang dinamis, kontekstual, dan relatif. Prinsip dasar yang mendasari kebijakan kurikulum adalah perubahan dan kelangsungan, yang mengindikasikan bahwa perubahan dilakukan secara terus-menerus (Machali, 2014).

Pelaksanaan perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum, melibatkan suatu proses yang kompleks. Penyusun kebijakan harus mempertimbangkan tingkat kompleksitas ini, mengingat kesuksesan sebuah kurikulum tidak hanya ditentukan oleh rancangannya, tetapi juga oleh kemampuan manajemen perubahan dan strategi yang diterapkan untuk

mendukung lembaga pendidikan dan pendidik dalam menerapkannya. Ball dan rekan-rekannya (2012) menekankan bahwa seringkali perubahan kebijakan, termasuk kurikulum, tidak secara signifikan mengubah praktik di dalam ruang kelas di lembaga pendidikan, dikarenakan pembuat kebijakan kurang memperhatikan kompleksitas implementasinya di tingkat lokal, baik di tingkat daerah, lembaga pendidikan, maupun di kelas.

Spillane (2004) mengilustrasikan proses implementasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke guru dengan menggunakan analogi "pesan berantai". Dalam permainan ini, pesan disampaikan dari pemain di ujung kiri dan berlanjut ke pemain berikutnya, sehingga mencapai pemain terakhir. Dalam konteks implementasi kebijakan di satuan pendidikan, permainan "pesan berantai" menjadi lebih kompleks. Satuan pendidikan dan pendidik, sebagai pemain ketiga dalam permainan tersebut, tidak hanya menerima pesan dari pemerintah pusat (pemain pertama), melainkan juga dari berbagai pihak lain. Pesan-pesan ini dapat berasal dari pemerintah daerah, orang tua siswa, masyarakat, bahkan siswa sendiri. Mereka menyampaikan harapan, keluhan, dan pandangan yang menginginkan satuan pendidikan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka. Analogi ini mencerminkan kompleksitas implementasi kurikulum di lapangan.

Stephen, dkk (2012) mengamati bahwa seringkali masalah implementasi diselesaikan dengan pembuatan kebijakan baru tanpa adanya perubahan signifikan pada strategi implementasinya. Tindakan ini dilakukan dengan asumsi bahwa desain kebijakan memiliki dampak yang cukup kuat untuk mengatur perilaku guru yang melaksanakannya, tanpa mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut diperkenalkan dan dikelola selama implementasinya. Ketika kebijakan gagal

membawa perubahan di satuan pendidikan, hal ini dianggap sebagai kegagalan desain daripada kegagalan implementasi. Di sisi lain, menurut Taylor (1997, sebagaimana dikutip oleh Ball dkk., 2012), respons ini juga muncul karena pemerintah merasa bahwa pembuatan kebijakan dapat mereka kendalikan, sedangkan faktor-faktor di tingkat dasar berada di luar kendali mereka. Konsekuensinya, muncul ungkapan "*the more things change, the more they remain the same*" (semakin banyak perubahan, semakin banyak yang tetap sama) (Wilcox dkk., 2017). Hal ini disebabkan oleh terus-menerusnya perubahan yang dilakukan tanpa menyelesaikan masalah strategi implementasi yang mendasar.

Dalam penelitiannya tentang cara sekolah-sekolah di Amerika Serikat menanggapi reformasi kebijakan, Anthony Bryk, dkk (2015) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda akan selalu menimbulkan reaksi dan tanggapan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh interaksi antara kebijakan yang berasal dari luar sekolah dengan kebijakan, praktik, tradisi, dan budaya yang sudah berlaku di dalam sekolah. Proses adaptasi kebijakan sering kali memunculkan konflik dan tantangan baru di satuan pendidikan, dan pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran (Bryk et al., 2015). Meskipun demikian, pemerintah seharusnya tidak meninggalkan satuan pendidikan untuk mengatasi proses pembelajaran yang dinamis tersebut sendiri. Sebaliknya, dukungan terus diperlukan agar proses di satuan pendidikan menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu implementasi kebijakan yang benar-benar berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Dinamika dan masalah baru yang muncul akibat diperkenalkannya dan diimplementasikannya kebijakan baru bervariasi tergantung pada konteks masing-

masing satuan pendidikan. Sementara itu, pada waktu yang sama, pentingnya dukungan dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan perlu diperhatikan untuk memfasilitasi proses implementasi.

Dalam proses pembelajaran, para ahli sepakat bahwa guru memegang peran sentral dalam implementasi perubahan kurikulum, sedangkan siswa sebagai fokus utamanya (Spillane et al., 2002). Implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan menjadi kompleks ketika para pelaku kebijakan lokal, termasuk guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah, mulai memahami atau mengartikan kebijakan tersebut (Spillane et al., 2002). Kompleksitas proses interpretasi kebijakan semakin bertambah dengan adanya elaborasi pemahaman antar pelaksanaan kebijakan di dalam satuan pendidikan. Selain itu, terdapat dinamika perdebatan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, satu kebijakan pendidikan dari pusat tidak pernah bersifat tunggal; sebaliknya, kebijakan tersebut mengalami variasi dalam interpretasi dan implementasinya di tingkat lokal (Ball, 2005). Kebijakan tersebut terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu

Menurut Spillane, dkk (2002), terdapat tiga pengaruh terhadap pemaknaan (*sensemaking*) kebijakan, yaitu: (1) interpretasi individual, yang muncul saat individu memahami kebijakan dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, serta keyakinan mereka mengenai tujuan pendidikan, hakikat pembelajaran, dan peran pendidik dalam proses belajar; (2) interpretasi situasional atau interaksi individu dengan konteks sekitarnya di tempat mereka bekerja; dan (3) peran representasi pembuat kebijakan tak hanya terbatas pada interpretasi kebijakan, tetapi juga melibatkan bimbingan dan dukungannya. Representasi

ini mencakup pelatihan serta peran aktif pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Rangkaian pemahaman kebijakan oleh guru dapat digambarkan melalui dua aspek utama. Pertama, guru memiliki kekuasaan atau kendali (*agency*). Dengan kekuasaan ini, mereka dapat secara aktif menafsirkan dan membuat keputusan tentang bagaimana mereka akan merespons kebijakan yang diterima. Mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah mereka akan sepenuhnya melaksanakan kebijakan sesuai petunjuk pemerintah, memodifikasinya, atau bahkan mengabaikannya seolah-olah ada perubahan, padahal praktiknya tetap sama (Kneen et al., 2021; Spillane, 2004; Wilcox et al., 2017).

Kedua, walaupun guru bertanggung jawab atas pemaknaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan, proses ini tidak semata bergantung pada sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan tersebut. Dukungan dari pemerintah dan organisasi lain juga menjadi faktor krusial dalam membantu guru memahami kebijakan kurikulum yang baru.

Awalnya, dalam melaksanakan kebijakan, diharapkan satuan pendidikan dan para guru dapat mentaati petunjuk teknis dan panduan konkret yang telah disediakan. Namun, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan tersebut karena beberapa penelitian telah menyoroti bahwa pendekatan top-down tidak selalu memberikan hasil sesuai harapan. Sebagai alternatif, tren terkini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih umum diterapkan adalah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan konteks lokal mereka. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga keselarasan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah

ditetapkan, sebagaimana disoroti oleh Bryk et al. (2015) dan OECD (2019). Dengan kata lain, dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum saat ini, lebih banyak diterapkan pendekatan yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan. Pendekatan ini menjadi pilihan strategis, terutama dalam implementasi Kurikulum Merdeka, di mana satuan pendidikan memiliki opsi untuk melakukan pemilihan sesuai kebutuhan mereka.

Dari uraian tersebut, dapat diambil dua kesimpulan utama. Pertama, bagi pendidik dan satuan pendidikan, implementasi kurikulum dipahami sebagai suatu proses pembelajaran, yang kerap disebut sebagai proses pemaknaan (*sensemaking*). Kedua, upaya untuk mengendalikan proses implementasi secara totaliter dari atas ke bawah tidak hanya sulit dilaksanakan, tetapi juga berpotensi mengarah pada kegagalan, seperti yang telah disoroti oleh Ball et al. (2012), Honig (2006), dan Tyack & Cuban (1997). Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa akhirnya guru yang memiliki kontrol penuh terhadap cara implementasi kurikulum. Oleh karena itu, perancangan implementasi harus mempertimbangkan bahwa dokumen kebijakan, seperti Keputusan Menteri, panduan, dan materi pelatihan, akan diinterpretasikan oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk guru, kepala sekolah, dan juga aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses tersebut, seperti narasumber dan pelatih guru.

Penerapan Kurikulum Merdeka telah dimulai di sekolah penggerak sejak tahun 2021. Namun, implementasinya belum dilakukan secara serentak di seluruh daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dimulai pada tahun 2021 dengan melibatkan 20 sekolah penggerak terpilih di Sumatera Utara. Panduan pelaksanaan dan

penerapan Kurikulum Merdeka telah diberikan oleh Kemendikbudristek melalui peraturan perundangan-undangan, yaitu Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.

Keputusan Menteri ini mengatur pedoman dan aturan pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD/ sederajat), dan Pendidikan Menengah (SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat) (Kempendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022). Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dimulai dengan empat kebijakan utama yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek pada tahun 2019. Kebijakan tersebut melibatkan transformasi Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter, pemindahan tanggung jawab Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada sekolah, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta perluasan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Evi Hasim, 2020). Implementasi ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2022.

Ketika keterbatasan kemampuan manusia bertemu dengan kebutuhan yang tak terbatas, pengaturan kegiatan dan pembagian kerja menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, manajemen memegang peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Manajemen yang efektif akan meningkatkan pemanfaatan dan hasil dari semua potensi yang dimiliki. Manajemen menetapkan tujuan dan langkah mencapainya dengan memanfaatkan enam elemen, yaitu manusia, uang, metode, materi, mesin, dan pasar (Badrudin, Hardienata, dan Retnowati, 2013).

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan tujuan menetapkan dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan jelas, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses pengintegrasian dan pengkoordinasian semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Jahari dan Syarbini, 2013).

Peran kepala sekolah sangat krusial dalam menetapkan kebijakan tingkat satuan pendidikan, menggerakkan sumber daya sekolah, serta memimpin proses pembelajaran. Melalui pengaturan manajemen di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kurikulum dan mencapai standar nasional pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Terkait kurikulum merdeka, maka kepala sekolah dituntut harus mampu memahami setiap regulasi kurikulum merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menerjemahkannya dalam bentuk aksi nyata. Maka kompetensi manajerial kepala sekolah dalam membuat kebijakan tingkat satuan Pendidikan, melakukan sosialisasi menyeluruh kepada *stakeholder*, mengatur pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran, serta disiplin melakukan monitoring dan evaluasi proses, yang tidak lain merupakan fungsi dari manajemen yang harus dijalankan agar sekolah memiliki perencanaan dan arah yang jelas menuju hasil yang ditargetkan, yakni tercapainya tujuan kurikulum merdeka.

Seperti yang disampaikan oleh Tilaar dan Nugroho (2009), kesuksesan sebuah kebijakan sebagian besar ditentukan pada perencanaan kebijakan sebesar 20%, implementasi kebijakan sebesar 60%, dan sisa 20% adalah kendali terhadap

implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan Udoji, sebagaimana dikutip oleh Wahab (2014), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat krusial, bahkan melebihi pentingnya pembuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya akan menjadi rencana yang baik dan tertata rapi dalam arsip jika tidak dijalankan dengan implementasi yang baik.

Terdapat berbagai teori yang dapat diterapkan dalam menganalisa implementasi kebijakan. Menurut Merilee S Grindle (Grindle, 1980), proses implementasi kebijakan merupakan kombinasi aktivitas politik dan administrasi yang dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) serta konteks kebijakan (*context of policy*). Di sisi lain, Meter dan Horn (Hill and Hupe, 2002) menunjukkan enam faktor yang dapat memengaruhi kinerja kebijakan, yaitu: a) standar dan sasaran kebijakan; b) ketersediaan sumber daya dan insentif; c) kualitas hubungan antar organisasi; d) karakteristik dari agen implementator; e) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan f) disposisi atau respon dari implementator.

Di bagian lain, George C Edwards III (Winarno, 2002) mengidentifikasi empat variabel utama dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, Sabatier dan Mazmanian (1980) memaparkan variabel lainnya yang memengaruhi tercapainya tujuan dalam suatu proses kebijakan, melibatkan (a) tingkat kesulitan masalah yang dihadapi; (b) tersedianya regulasi pendukung kebijakan; dan (c) faktor luar yang mempengaruhi implementasi.

SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara yang menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala

BSKAP nomor 034/H/KR/2022 dengan kategori Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMK Negeri 1 Air Putih pada tanggal 02 Februari 2023 diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan di SMK Negeri 1 Air Putih berjalan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan. SMK Negeri 1 Air Putih menggunakan Kurikulum Merdeka dengan kategori Mandiri Belajar. Penerapan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Air Putih dimulai sejak April 2022 setelah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSKAP nomor 034/H/KR/2022 dengan kategori Mandiri Belajar. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2023 melalui Surat Keputusan Kepala BSKAP nomor 022/H/KR/2023, SMK Negeri 1 Air Putih ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka dengan kategori Mandiri Berubah.

Meskipun telah menerapkan Kurikulum Merdeka, tidak terlihat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan sekolah dan kegiatan pembelajaran antara sebelum dan sesudah diterapkannya Kurikulum Merdeka. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari peneliti mengenai apakah sekolah sudah mengikuti Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek No. 56/M/2022 dan No. 262/M/2022. Peneliti juga menyoroti kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk memastikan pemahaman yang utuh dalam implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh Satuan Pendidikan yang menerapkannya, sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat sejumlah aspek menarik yang menjadi objek penelitian terkait implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara. Peneliti bermaksud untuk melakukan

analisis kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V yang berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Kabupaten Batu Bara, dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri di wilayah tersebut. Analisis ini dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 56/M/2022 dan No. 262/M/2022.

Penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Model ini mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk mengawasi implementasi kebijakan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk komunikasi dalam penyaluran kebijakan dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara kepada satuan pendidikan ?
2. Bagaimana sosialisasi kebijakan dilakukan untuk memberi kejelasan yang diterima pelaksana?
3. Bagaimana konsistensi dalam menyampaikan isi dari kebijakan?
4. Apa saja kemampuan sumber daya yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan?
5. Bagaimana kepatuhan pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan?

6. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan?
7. Apa saja fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan?
8. Bagaimana pemilihan personil pelaksana kebijakan dilakukan?
9. Bagaimana pengaturan sistem dalam pelaksanaan kebijakan?
10. Apakah terdapat pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan?
11. Apakah terdapat Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan acuan pelaksanaan kebijakan?
12. Bagaimana pendistribusian tanggung jawab berbagai kegiatan atau program dalam mengimplemantasikan kebijakan ke masing-masing bidang?
13. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
14. Bagaimana dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
15. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
16. Bagaimana dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
17. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?

1.3. Fokus Masalah

Berdasarkan penelitian masalah yang telah diidentifikasi, fokus penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar yang dilaksanakan di SMK Negeri Kabupaten Batu Bara, dengan pertimbangan

komunikasi dalam menyampaikan isi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia yang dituju, sikap yang diberikan birokrasi dalam mencapai kesepahaman kebijakan di setiap struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

1.4. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
4. Bagaimana dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?
5. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara.
2. Menganalisis dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara.
3. Menganalisis disposisi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara.

4. Menganalisis dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara.
5. Menganalisis implementasi kebijakan kurikulum merdeka SMK Negeri di Kabupaten Batu Bara

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, guru, dan dosen yang tertarik dengan implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah, terutama pada jenjang Pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat :

- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di SMK..
- b. Bagi Kepala Cabang Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kurikulum merdeka di SMK.

- c. Bagi Kepala SMK sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kurikulum merdeka di SMK.
- d. Bagi guru sebagai pembelajaran dan evaluasi terhadap kinerja dan peningkatan kualitas pembelajaran yang memerdekakan.
- e. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi petunjuk dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

